

EVALUASI KEBIJAKAN AKUNTANSI BIAYA PINJAMAN ATAS ASET TETAP DI INDONESIA

I Kadek Arik Juana Putra¹

Amrie Firmansyah²

¹(Program Studi D3 Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN)

²(Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN)

¹arikjuanap@gmail.com, ²amrie@pknstan.ac.id

Abstract

This study aims to determine the implementation of loan cost accounting policies on fixed assets in food and beverage sub-sector companies in Indonesia. Based on purposive sampling, a sample of 18 companies was obtained. The research data is sourced from the financial statements of food and beverage sub-sector companies listed on the IDX from 2012 to 2019 which were obtained from www.idx.co.id and <https://www.idnfinancials.com>. This study employs a qualitative method with a content analysis approach and interviews. The content analysis method is used to obtain information on the application of borrowing cost accounting policies on property, plant and equipment and information regarding the disclosure of the amount of capitalized borrowing costs and capitalization rates. In addition, the interview method was carried out as a follow-up to obtain the views of experts to elaborate the results of the content analysis on the disclosure of fixed asset loan cost accounting policies. This study concludes that there are 15 out of 18 companies that do not meet the requirements for disclosure of borrowing costs on fixed assets as regulated in PSAK 26.

Keywords: *accounting policies, accounting standards, borrowing costs, fixed assets.*

I. PENDAHULUAN

Pembiayaan merupakan aktivitas penyediaan dana untuk pihak yang mengalami kekurangan modal dalam rangka peningkatan usaha dengan timbal balik berupa imbalan atau bagi hasil (Nurhadi, 2018). Fungsi pembiayaan adalah untuk pemanfaatan sumber daya ekonomi secara efektif, peningkatan perolehan laba, serta meminimalisir risiko kekurangan modal yang mungkin dialami oleh perusahaan (Izzanizza, 2013).

Nilai pasar pembiayaan global mencapai hampir \$6.875,5 Miliar pada tahun 2019, dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 4,9% sejak tahun 2015. Pada tahun 2020, nilai tersebut diperkirakan turun menjadi \$ 6.751,2

Miliar atau sekitar -1,8% akibat aturan *lockdown* dan *social distancing* yang diberlakukan di banyak negara dan perlambatan ekonomi global sebagai dampak Pandemi Covid-19. Dalam rentang tahun 2021-2023 nilai pasar pembiayaan global diperkirakan tumbuh 5,5% setiap tahunnya dan mencapai nilai \$7,929 Miliar (www.globenewswire.com, 2020). Sementara di Indonesia, pada bulan Oktober 2020 nilai aset lembaga pembiayaan di Indonesia adalah Rp. 581,761 Triliun (OJK, 2020).

Aset tetap merupakan elemen penting perusahaan untuk menunjang perolehan laba dan peningkatan kinerja. Nilai investasi aset tetap suatu perusahaan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya laba yang akan diperoleh (Hapsah, 2017). Pernyataan tersebut sesuai dengan data laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. yang memiliki aset tetap senilai Rp. 43.072.504.000.000,00 dapat memperoleh laba sebesar Rp. 5.902.729.000.000,00 pada tahun 2019 sementara PT. Prima Cakrawala Abadi Tbk yang memiliki aset tetap senilai Rp. 10.773.632.395,00 mengalami kerugian sebesar Rp. 10.257.599.104,00 pada tahun 2019 (Bursa Efek Indonesia, 2020).

Permasalahan dalam pengadaan aset tetap adalah tidak semua perusahaan memiliki sumber pendanaan internal yang cukup. Alternatif yang dapat diambil yaitu pemanfaatan pembiayaan berupa penerbitan saham atau peminjaman (Kieso et al., 2018). Penerbitan saham memiliki kelemahan berupa penurunan presentase kepemilikan perusahaan yang dapat menyebabkan pergeseran pengendalian perusahaan serta memerlukan biaya lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan cenderung memilih melakukan peminjaman dana.

Sebagai konsekuensi pembiayaan dengan peminjaman dana, perusahaan akan menanggung bunga dan biaya lain berupa biaya pinjaman. PSAK 26 tahun 2008 menjadi pedoman yang mengatur tentang penyajian dan pengungkapan atas biaya pinjaman. Biaya pinjaman yang berkaitan dengan perolehan, konstruksi atau produksi aset dapat dikapitalisasi sebagai biaya perolehan aset tersebut sementara biaya pinjaman lainnya harus diakui sebagai beban (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Penerapan akuntansi biaya pinjaman atas aset tetap sangat krusial mengingat pemanfaatan pembiayaan dapat meningkatkan aset tetap perusahaan untuk menunjang perolehan laba dan peningkatan kinerja namun disisi lain, memungkinkan adanya

ketidapatuhan perusahaan dalam mengkapitalisasi biaya pinjaman yang seharusnya diakui sebagai beban tetapi oleh perusahaan dikapitalisasi menjadi aset tetap.

Wirjolukito (2004) menunjukkan bahwa penerapan PSAK 26 tahun 1997 menimbulkan efek bias pada nilai aset, manajemen laba dan penyajian angka lainnya. Muthupandian (2009) menyimpulkan perubahan IAS 23 menghilangkan perbedaan utama dalam pelaporan keuangan dan meningkatkan komparabilitas dan konvergen antara IFRS dan US GAAP. Dragu dan Tudor (2011) mengembangkan model ekonometrik untuk mengukur evolusi pengungkapan informasi atas IAS 23 di Eropa dengan kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara pengungkapan informasi terhadap IAS 23 dengan elemen-elemen seperti negara asal, penjualan, total aset, rasio utang, ROA dan ROE di Eropa. Pratiwi (2013) membandingkan perlakuan akuntansi biaya pinjaman PT. "X" terhadap PSAK 26 tahun buku 2011 dengan kesimpulan bahwa PT "X" belum melakukan kapitalisasi biaya pinjaman. Rolihlahla (2012) meninjau perlakuan akuntansi biaya pinjaman pada industri properti melalui kredit perbankan dengan kesimpulan bahwa kapitalisasi biaya pinjaman dilakukan jika pinjaman digunakan untuk melakukan pembiayaan aset kualifikasian. Yildiz & Kurtlar (2016) menunjukkan bahwa kapitalisasi biaya pinjaman dampak pajak tangguhan yang tidak diperhitungkan dalam neraca sebesar 20% pada perusahaan manufaktur di Turki. Daniela (2018) membandingkan kebijakan akuntansi biaya pinjaman Romania dengan IAS 23 tentang *Borrowing Costs* di mana terdapat perbedaan yaitu pada referensi Romania tidak ada kondisi pinjaman khusus dan pinjaman umum sebagaimana yang diatur dalam referensi internasional.

Penelitian yang membahas akuntansi aset tetap dilakukan oleh Pahlepi (2011) menyimpulkan bahwa akuntansi PT PLN Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta tidak menyimpang dari Standar Akuntansi yang berlaku. Fatrianisa et al (2013) menyimpulkan bahwa akuntansi aset tetap pada Rumah Sakit Sriwijaya Eye Centre Palembang sesuai dengan PSAK 16. Djafar (2016) menyimpulkan bahwa kebijakan pengakuan dan pencatatan atas aset tetap kendaraan pada PT. XYZ sesuai PSAK 16 namun penyajian pada neraca tidak sesuai dengan PSAK 16. Putri et al (2017) menyimpulkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap pada PT. Fokusindo Mitra Teknik dalam hal pengukuran

aset tetap dinilai tidak wajar dan belum sesuai dengan PSAK 16. Sudiantara (2018) menyatakan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap pada Hotel Sayang Maha Mertha belum memenuhi SAK Nomor 16 Tahun 2009. Wahyuni (2019) menunjukkan bahwa akuntansi aset tetap pada PT Asam Jawa Medan sesuai dengan PSAK 16 dalam terkait pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian dan pelepasan namun belum sesuai dalam hal penyajian dan pengungkapan. Bakri & Adriani (2020) menyimpulkan bahwa kebijakan akuntansi aset tetap pada PT PLN wilayah Makassar Selatan mendekati ketentuan PSAK 16. Firmansyah (2020) menunjukkan bahwa sebagian perusahaan pada indeks LQ45 menggunakan metode penyusutan aset tetap sesuai SAK dan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan akuntansi biaya pinjaman atas aset tetap. Berbeda dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh Djafar (2016), Putri et al (2017), Sudiantara (2018), Wahyuni (2019), dan Bakri & Adriani (2020) yang secara umum mengulas penerapan PSAK 16 terkait perolehan, penilaian, pengeluaran selama penggunaan, penyusutan, pelepasan dan penyajian aset tetap di neraca, penelitian ini mengulas penerapan PSAK 26 terkait biaya pinjaman atas aset tetap yang meliputi evaluasi kesesuaian kapitalisasi biaya pinjaman atas aset tetap atau seharusnya diakui sebagai beban. Selain itu, penelitian ini mengulas kesesuaian kebijakan pengungkapan terkait penghitungan tarif yang digunakan dalam kapitalisasi terhadap standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Data penelitian diperoleh dari laporan keuangan perusahaan industri manufaktur subsektor makanan dan minuman di BEI tahun 2012-2019. Proporsi rata-rata aset tetap perusahaan subsektor tersebut yaitu berupa mesin, peralatan dan bangunan pabrik yang mencapai 52,82% dalam struktur asetnya dikarenakan kegiatan utamanya adalah mengolah bahan baku dan menghasilkan produk jadi (Margani et al., 2019).

Penelitian diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi investor eksisting dan potensial untuk menggunakan informasi akuntansi khususnya biaya pinjaman sebagai dasar pemilihan investasi. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia, penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dalam peningkatan penerapan standar akuntansi biaya pinjaman atas aset tetap.

II. KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan PSAK 16 (IAI, 2018), aset tetap merupakan aset berwujud yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lain, atau yang diperkirakan dapat digunakan lebih dari satu periode. Biswan & Mahrus (2020) menyatakan bahwa aset berwujud yang dapat bertahan dalam jangka panjang dalam operasi bisnis regular yang terdiri atas properti fisik berupa peralatan, perabotan, mesin, tanah dan bangunan. Baridwan (2013) menyatakan bahwa aset tetap merupakan aset berwujud dengan sifat yang relatif permanen digunakan dalam kegiatan perusahaan.

Tabel 1
Proporsi Struktur Aset Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman

| Jenis Aset | Rata-rata (Rp) | Persentase Proporsi |
|---------------------|--------------------|---------------------|
| Kas dan Setara Kas | 1.971.852.191.663 | 18,03% |
| Piutang Usaha | 1.084.579.424.460 | 9,92% |
| Aset Lancar Lainnya | 2.104.488.256.301 | 19,24% |
| Aset Tidak Lancar | 5.777.107.334.133 | 52,82% |
| Total Aset | 10.938.027.206.558 | 100,00% |

Sumber: Margani et al (data diolah), 2019

Pengadaan aset tetap penting dilakukan oleh perusahaan subsektor makanan dan minuman (Margani et al, 2019). Pada tabel 1 terlihat bahwa proporsi aset tetap perusahaan subsektor makanan dan minuman lebih dominan dibanding jenis aset lainnya. Hal tersebut wajar terjadi mengingat proses bisnis perusahaan subsektor makanan dan minuman yaitu mengolah bahan baku untuk menghasilkan produk jadi.

Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, pinjaman merupakan penyediaan uang yang terbentuk berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lainnya dengan kewajiban melunasi pinjaman tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Suyatno (2016) menyatakan bahwa pinjaman merupakan penyediaan uang atau yang dipersamakan sesuai dengan persetujuan antara bank dengan pihak yang membutuhkan pinjaman dan berkewajiban melunasinya pada jangka waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunga.

Berdasarkan paragraf 07 PSAK 16, biaya perolehan diakui sebagai aset jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan, dan atas biaya perolehannya dapat dilakukan pengukuran secara andal. Berdasarkan paragraf 23 PSAK 16, biaya perolehan aset tetap setara dengan harga tunai saat tanggal pengakuan. Apabila pembayaran ditangguhkan

melampaui jangka waktu kredit normal maka selisih harga tunai dengan total pembayaran diakui sebagai beban bunga kecuali beban bunga tersebut dikapitalisasi. Berdasarkan paragraf 15 PSAK 16, aset tetap yang memenuhi kualifikasi sebagai aset diukur sesuai biaya perolehannya, meliputi harga perolehan, biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk menempatkan aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, dan biaya pembongkaran, pemindahan, restorasi lokasi aset tetap tersebut. Berdasarkan paragraf 17 PSAK 16, contoh biaya tersebut adalah biaya imbalan kerja, biaya penyiapan lahan, biaya penyerahan awal, biaya instalasi dan perakitan, biaya pengujian aset, dan *fee* professional.

Biaya pinjaman adalah biaya lain yang harus dikeluarkan terkait dengan peminjaman dana yang dilakukan suatu entitas (IAI, 2018). Biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan adalah biaya pinjaman yang diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi dan produksi, sementara biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban (paragraf 1 PSAK 26). Biaya pinjaman mencakup beban bunga, beban keuangan, dan selisih kurs atas pinjaman dalam mata uang asing (paragraf 5 PSAK 26). Permulaan kapitalisasi biaya pinjaman dilakukan ketika entitas memenuhi kondisi yaitu adanya pengeluaran untuk aset, adanya biaya pinjaman, dan entitas telah mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual (paragraf 17 PSAK 26). Pengeluaran yang memenuhi kualifikasi hanya mencakup pengeluaran yang mengakibatkan pembayaran kas, pengalihan aset lain, atau liabilitas berbunga yang diambil alih (IAI, 2018).

Tahapan yang harus dilakukan oleh entitas yang menerapkan PSAK 26 dalam mengkapitalisasi biaya pinjaman meliputi a) memastikan aset tetap tersebut memenuhi kualifikasi, b) Menentukan periode kapitalisasi, c) Menentukan rata-rata tertimbang pengeluaran yang dibiayai dengan pinjaman umum, d) Menghitung tarif bunga rata-rata tertimbang pinjaman umum, dan e) Menentukan jumlah bunga yang dikapitalisasi. Penghitungan tarif rata-rata tertimbang pinjaman umum dilakukan jika terdapat lebih dari satu pinjaman umum (Biswan & Mahrus, 2020).

Berdasarkan paragraf 12 PSAK 26, apabila peminjaman dana secara khusus, maka jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebesar biaya pinjaman aktual dikurangi hasil investasi pinjaman tersebut. Berdasarkan

paragraf 14 PSAK 26, apabila peminjaman dana secara umum maka penentuan jumlah biaya pinjaman adalah dengan menerapkan tarif kapitalisasi terhadap pengeluaran atas aset tetap tersebut. Tarif kapitalisasi merupakan rata-rata tertimbang biaya pinjaman atas saldo pinjaman (IAI, 2018). Disamping itu, entitas juga memastikan agar jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi pada periode tersebut (IAI, 2018).

Berdasarkan paragraf 20 PSAK 26, penghentian sementara kapitalisasi biaya pinjaman dilakukan apabila pengembangan aset dihentikan. Penghentian kapitalisasi biaya pinjaman dilakukan apabila seluruh aktivitas yang berkaitan dengan persiapan aset agar dapat digunakan atau dijual telah selesai secara substansial (IAI, 2018). Apabila konstruksi suatu aset diselesaikan per bagian, maka entitas menghentikan kapitalisasi biaya pinjaman apabila aktivitas untuk mempersiapkannya telah selesai secara substansial (IAI, 2018). Berdasarkan paragraf 26 PSAK 26, pengungkapan yang dilakukan oleh suatu entitas terkait akuntansi biaya pinjaman meliputi jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi dan nilai tarif kapitalisasi.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi dan wawancara. Analisis isi digunakan memperoleh informasi perusahaan dalam menerapkan kebijakan akuntansi biaya pinjaman atas aset tetap. Informasi lainnya adalah pengungkapan jumlah biaya pinjaman dan tarif kapitalisasi dalam penentuan nilai biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Analisis isi dilakukan berdasarkan data dan informasi laporan keuangan Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI yang bersumber dari www.idx.co.id dan www.idnfinansials.com. Diperoleh sampel sebanyak 18 perusahaan yang digunakan dalam penelitian dengan rincian sebagaimana dalam lampiran

Tabel 2
Sampel Penelitian

| Kriteria | Jumlah |
|---|--------|
| Perusahaan yang subsektor makanan dan minuman terdaftar di BEI per September 2020 | 30 |
| Perusahaan yang terdaftar di BEI setelah 31 Desember 2012 | (12) |
| Jumlah perusahaan sampel | 18 |

Sumber: Diolah dari www.invesnesia.com (2021)

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis isi dilanjutkan dengan wawancara kepada dua informan. Informan 1 adalah akademisi dibidang akuntansi keuangan dan menguasai Standar Akuntansi Keuangan dan informan 2 adalah akademisi dan praktisi di bidang akuntansi keuangan. Wawancara dilakukan sebagai tindak lanjut untuk mendapat pandangan para ahli dalam rangka mengelaborasi hasil analisis isi atas pengungkapan kebijakan akuntansi biaya pinjaman aset tetap pada laporan keuangan dan penerapan PSAK 26 di Indonesia. Wawancara dilakukan bulan Mei 2021.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis isi pada sampel penelitian, berikut adalah kebijakan akuntansi biaya pinjaman atas aset tetap pada perusahaan subsektor makanan dan minuman di Indonesia tahun 2012-2019.

1. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA)

Berdasarkan catatan laporan keuangan konsolidasian, manajemen perusahaan melakukan kapitalisasi biaya pinjaman pada tahun 2012-2017 sesuai PSAK 26. Manajemen menyajikan aset dalam penyelesaian sebagai bagian dari aset tetap dan mengkapitalisasi seluruh biaya selama periode konstruksi aset tetap. Manajemen akun aset dalam penyelesaian dipindahkan ke aset tetap saat aset selesai dan siap digunakan. Kapitalisasi biaya pinjaman yang diakui meliputi bunga dan selisih kurs atas pinjaman dalam mata uang asing dan biaya lainnya terkait peminjaman dana. Manajemen menetapkan kapitalisasi biaya pinjaman dilakukan atas biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset sementara biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Tahun 2018 dan 2019, manajemen mengungkapkan bahwa perusahaan tidak melakukan kapitalisasi biaya pinjaman atas aset tetap.

Berdasarkan uraian dapat diketahui bahwa saat pengakuan biaya pinjaman, manajemen tidak mengungkapkan jenis pinjaman yang digunakan baik pinjaman khusus maupun umum. Manajemen juga tidak mengungkapkan besaran tarif kapitalisasi yang digunakan pada saat kapitalisasi biaya pinjaman. Hal ini sangat penting mengingat jenis pinjaman yang digunakan dan besaran tarif kapitalisasi akan berpengaruh dalam penentuan besarnya

biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi oleh perusahaan. Manajemen juga tidak memberikan informasi yang jelas terkait penentuan waktu permulaan dan penghentian kapitalisasi. Dengan demikian, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk belum sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur PSAK 26.

2. PT Tri Banyan Tirta Tbk (ALTO)

Pada tahun 2012-2014 dan 2019, manajemen perusahaan telah mengungkapkan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman atas aset tetap. Kapitalisasi dilakukan atas biaya pinjaman yang secara langsung atau tidak langsung dapat diatribusikan dengan akuisisi, konstruksi atau produksi aset tetap. Perusahaan juga membedakan perlakuan pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dan tidak langsung. Pinjaman yang dapat diatribusi secara langsung, nilai kapitalisasinya adalah sebesar biaya pinjaman selama tahun berjalan dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut. Sementara pinjaman yang tidak dapat diatribusi secara langsung, nilai kapitalisasi ditentukan berdasarkan hasil kali antara tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset tetap. Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian pada periode biaya tersebut terjadi. Di sisi lain, perusahaan tidak mengungkapkan jenis pinjaman yang digunakan untuk mengadakan aset tetap. Perusahaan juga tidak menyajikan dan mengungkapkan besaran biaya pinjaman yang dikapitalisasi dan tarif kapitalisasi. Dapat disimpulkan PT Tri Banyan Tirta Tbk belum sepenuhnya menerapkan kebijakan yang diatur dalam PSAK 26.

3. PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA)

Pada tahun 2012-2019 manajemen menyajikan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman. Perusahaan tidak mengungkapkan jenis pinjaman yang digunakan untuk mengadakan aset tetap. Perusahaan juga tidak menyajikan dan mengungkapkan besaran biaya pinjaman yang dikapitalisasi dan tarif kapitalisasi. Oleh karena itu, PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk belum sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dalam PSAK 26.

4. PT Delta Djakarta Tbk (DLTA)

Pada tahun 2012-2019, manajemen perusahaan tidak menyajikan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman atas aset tetap. Manajemen hanya menyatakan bahwa perusahaan menerapkan PSAK 26 terkait biaya pinjaman tetapi penerapan tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

laporan keuangan konsolidasian. Berdasarkan hal tersebut, diasumsikan selama periode tahun 2012-2019 PT Delta Djakarta Tbk tidak melakukan kapitalisasi biaya pinjaman atas aset tetap.

5. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahun 2012-2019 manajemen menyajikan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman. Aset tetap dalam pengerjaan dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk kapitalisasi beban bunga dan laba rugi selisih kurs atas pinjaman dan biaya lainnya sehubungan dengan pembiayaan aset tetap dalam pembangunan. Manajemen melakukan kapitalisasi atas biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset tetap sementara biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Permulaan kapitalisasi biaya pinjaman dilakukan pada saat aktivitas untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan dan pengeluaran untuk aset tetap dan biaya pinjamannya telah terjadi dan penghentian kapitalisasi adalah ketika seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset tetap telah selesai secara substansial.

Pada tahun 2012 dan 2013 manajemen mengungkapkan jumlah biaya yang dikapitalisasi dan besaran tarif kapitalisasi sesuai ketentuan PSAK 26, namun tidak menyebutkan jenis pinjaman yang digunakan termasuk pinjaman umum atau khusus sehingga tidak diketahui apakah pinjaman memiliki penghasilan investasi atau tidak. Pada tahun 2014 manajemen mengungkapkan bahwa tidak ada biaya pinjaman yang dikapitalisasi. Pada 2015-2019 perusahaan tidak mengungkapkan informasi yang jelas terkait kapitalisasi biaya pinjaman. Hal tersebut menjadi tidak konsisten mengingat manajemen telah menetapkan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman atas aset tetap pada periode tersebut namun tidak melakukan pengungkapan atas jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi dan tarif kapitalisasi yang digunakan dalam menentukan jumlah biaya pinjaman. Oleh karena itu, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk belum sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dalam PSAK 26.

6. PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)

Pada tahun 2012-2019 manajemen perusahaan menyajikan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman. Aset tetap dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk kapitalisasi beban bunga dan laba rugi

selisih kurs atas pinjaman dan biaya lainnya sehubungan dengan pembiayaan aset tetap dalam pembangunan. Manajemen mengkapitalisasi biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset tetap sementara biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban. Manajemen mengungkapkan bahwa permulaan kapitalisasi biaya pinjaman dilakukan pada saat aktivitas untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan dan pengeluaran untuk aset tetap dan biaya pinjamannya telah terjadi dan penghentian kapitalisasi adalah ketika seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset tetap telah selesai secara substansial. Oleh karena itu, PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah menerapkan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman atas aset tetap yang diatur dalam PSAK 26.

7. PT Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI)

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahun 2012-2014, manajemen tidak menyajikan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman. Manajemen juga tidak menyatakan bahwa penerapan PSAK 26 terkait biaya pinjaman memiliki pengaruh atau tidak terhadap laporan keuangan konsolidasian. Maka dapat diasumsikan bahwa selama rentang tahun 2012-2014 perusahaan tidak melakukan kapitalisasi biaya pinjaman atas aset tetap.

Tahun 2015-2019 manajemen perusahaan menyajikan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman atas aset tetap. Aset tetap dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan aset tersebut. Manajemen tidak mengungkapkan jenis pinjaman yang digunakan dan tidak menyajikan dan mengungkapkan besaran biaya pinjaman yang dikapitalisasi dan tarif kapitalisasi. Oleh karena itu, PT Multi Bintang Indonesia Tbk belum sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dalam PSAK 26.

8. PT Mayora Indah Tbk (MYOR)

Pada tahun 2012-2019 manajemen menyajikan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman atas aset tetap. Dalam periode 2012-2016 dan 2019 manajemen mengakui dan mengungkapkan jumlah biaya pinjaman atas aset tetap yang telah dikapitalisasi. Manajemen tidak memberikan informasi yang jelas mengenai tarif kapitalisasi dalam menentukan jumlah biaya pinjaman dan jenis pinjaman termasuk pinjaman umum atau pinjaman khusus. Tahun 2017 dan 2018 manajemen tidak mengungkapkan ada tidaknya biaya pinjaman atas

aset tetap yang dikapitalisasi sebagaimana kebijakan akuntansi biaya pinjaman atas aset tetap yang diterapkan pada tahun tersebut. Oleh karena itu, PT Mayora Indah Tbk belum sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dalam PSAK 26.

9. PT Prasadha Aneka Niaga Tbk (PSDN)

Pada tahun 2012-2019 manajemen menyajikan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman atas aset tetap dengan istilah “beban pinjaman”. Namun, perusahaan tidak mengungkapkan informasi ada atau tidaknya kapitalisasi biaya pinjaman. Hal ini tidak konsisten mengingat manajemen menetapkan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman atas aset tetap tetapi tidak mengungkapkan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi dan tarif kapitalisasi yang digunakan. Oleh karena itu, PT Prasadha Aneka Niaga Tbk belum sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur PSAK 26.

10. PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI)

Pada tahun 2012-2019 manajemen perusahaan menyajikan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman atas aset tetap. Tahun 2012 manajemen mengungkapkan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi serta jenis pinjaman yang digunakan untuk menciptakan aset yaitu berupa pinjaman khusus. Karena menggunakan pinjaman khusus maka manajemen diasumsikan tidak perlu mengungkapkan tarif kapitalisasi biaya pinjaman. Pada 2013 dan 2014 manajemen mengungkapkan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tetapi tidak memberikan informasi yang jelas mengenai jenis pinjaman yang digunakan dan besaran tarif kapitalisasi yang digunakan dalam penentuan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi.

Pada tahun 2015-2016 dan 2019 perusahaan tidak memberikan informasi yang jelas terkait ada tidaknya kapitalisasi biaya pinjaman atas aset tetap. Tahun 2017 dan 2018 perusahaan mengungkapkan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi beserta tarif kapitalisasi namun tidak memberikan informasi jelas terkait jenis pinjaman yang digunakan. Oleh karena itu, bahwa PT Nippon Indosari Corpindo Tbk belum sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dalam PSAK 26.

11. PT Sekar Bumi Tbk (SKBM)

Pada tahun 2012-2019 manajemen menyajikan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman atas aset tetap. Manajemen menegaskan permulaan

kapitalisasi biaya pinjaman yaitu saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya telah dilaksanakan dan pengeluaran untuk aset tetap dan biaya pinjamannya telah terjadi sementara penghentian kapitalisasi dilakukan pada saat seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya telah selesai secara substansial. Selama periode tersebut perusahaan tidak mengungkapkan informasi yang jelas terkait ada atau tidaknya kapitalisasi biaya pinjaman. Oleh karena itu, PT Sekar Bumi Tbk belum sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur PSAK 26.

12. PT Sekar Laut Tbk (SKLT)

Pada tahun 2012-2019 manajemen perusahaan tidak menyajikan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman atas aset tetap. Manajemen hanya menyatakan bahwa perusahaan telah menerapkan PSAK 26 tetapi tidak menimbulkan efek material laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, dapat diasumsikan bahwa selama periode tahun 2012 sampai dengan 2019 perusahaan tidak melakukan kapitalisasi biaya pinjaman atas aset tetap.

13. PT Siantar Top Tbk (STTP)

Pada tahun 2012-2019 manajemen perusahaan menyajikan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman atas aset tetap. Perusahaan menetapkan kebijakan bahwa biaya bunga dan biaya pinjaman lain untuk pendanaan proses pembangunan aset tetap tertentu dikapitalisasi sampai dengan saat proses pembangunan selesai. Biaya tersebut dipindahkan ke akun aset tetap saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Perusahaan tidak mengungkapkan informasi yang jelas terkait ada atau tidaknya kapitalisasi biaya pinjaman. Oleh karena itu, PT Siantar Top Tbk belum sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman atas aset tetap sebagaimana yang diatur dalam PSAK 26.

14. PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ)

Tahun 2012-2019 manajemen menyajikan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman atas aset tetap. Selama rentang periode tersebut perusahaan tidak mengungkapkan informasi yang jelas terkait ada atau tidaknya kapitalisasi biaya pinjaman. Oleh karena itu, PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk belum sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman atas aset tetap sebagaimana diatur dalam PSAK 26.

15. PT Akasha Wira International Tbk (ADES)

Pada tahun 2012-2019 manajemen perusahaan tidak menyajikan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman atas aset tetap. Namun pada tahun 2015 manajemen mengungkapkan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi. Manajemen tidak memberikan informasi yang jelas mengenai cara pengakuan dan pengukuran biaya pinjaman atas aset tetap yang dilakukan. Manajemen juga tidak mengungkapkan jenis pinjaman yang digunakan serta besaran tarif kapitalisasi yang digunakan. Oleh karena itu, PT Akasha Wira International Tbk belum sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman atas aset tetap sebagaimana yang diatur dalam PSAK 26.

16. PT Budi Starch & Sweetener Tbk (BUDI)

Tahun 2012 dan 2014-2019 manajemen perusahaan menyajikan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman atas aset tetap. Tahun 2012 dan 2014-2017 manajemen mengakui dan mengungkapkan jumlah biaya pinjaman atas aset tetap yang telah dikapitalisasi, namun tidak memberikan informasi jelas mengenai tarif kapitalisasi dalam penentuan jumlah biaya pinjaman dan jenis pinjaman yang dipakai dalam pembangunan atau pembuatan aset tetap. Pada tahun 2018 manajemen mengungkapkan perusahaan tidak melakukan kapitalisasi biaya pinjaman atas aset tetap. Pada tahun 2019 manajemen tidak mengungkapkan ada atau tidaknya kapitalisasi biaya pinjaman yang dilakukan. Maka disimpulkan bahwa PT Budi Starch & Sweetener Tbk belum sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur PSAK 26.

Pada tahun 2013 manajemen tidak menyajikan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman atas aset tetap dan tidak menyatakan bahwa penerapan PSAK 26 terkait biaya pinjaman memiliki pengaruh atau tidak terhadap laporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2013 perusahaan tidak mengkapitalisasi biaya pinjaman atas aset tetap.

17. PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk (BTEK)

Pada tahun 2012-2014 dan tahun 2018-2019 manajemen tidak menyajikan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman atas aset tetap. Pada tahun 2012 dan 2013 manajemen menyatakan bahwa perusahaan telah menerapkan PSAK 26 namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian. Berdasarkan hal tersebut dapat diasumsikan bahwa selama tahun 2012-2013 perusahaan tidak melakukan kapitalisasi

biaya pinjaman atas aset tetap. Pada tahun 2014 dan 2018-2019 manajemen tidak menyajikan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman atas aset tetap dan tidak menyatakan bahwa penerapan PSAK 26 terkait biaya pinjaman memiliki pengaruh atau tidak terhadap laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2014 dan tahun 2018-2019 perusahaan tidak melakukan kapitalisasi biaya pinjaman atas aset tetap.

Tahun 2015-2017 manajemen menyajikan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman atas aset tetap. Pada tahun 2016 manajemen mengakui dan mengungkapkan jumlah biaya pinjaman atas aset tetap yang telah dikapitalisasi, namun tidak memberikan informasi yang jelas mengenai tarif kapitalisasi yang digunakan untuk penentuan jumlah biaya pinjaman dan jenis pinjaman yang dipakai. Sementara tahun 2015 dan 2017 manajemen tidak mengungkapkan informasi yang jelas terkait ada atau tidaknya kapitalisasi biaya pinjaman. Oleh karena itu, PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk belum sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi yang diatur dalam PSAK 26.

18. PT Inti Agri Resources Tbk (IIKP)

Pada tahun 2012-2019 manajemen tidak menyajikan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman atas aset tetap. Namun, manajemen menyatakan bahwa perusahaan telah menerapkan PSAK 26 terkait biaya pinjaman dan penerapan tersebut berdampak signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan. Penjelasan tersebut menjadi tidak konsisten mengingat manajemen tidak menetapkan kebijakan akuntansi biaya pinjaman atas aset tetap dan tidak mengungkapkan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi maupun tarif kapitalisasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PT Inti Agri Resources Tbk belum sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi terkait biaya pinjaman atas aset tetap yang diatur dalam PSAK 26.

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat 15 dari 18 perusahaan subsektor makanan dan minuman tidak memenuhi standar akuntansi biaya pinjaman atas aset tetap.

4.1 Pembahasan Atas Temuan Implementasi Akuntansi Biaya Pinjaman Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, diketahui sebagian besar perusahaan subsektor makanan dan minuman masih belum sepenuhnya

memenuhi ketentuan akuntansi biaya pinjaman atas aset tetap. Ketentuan yang belum dipenuhi meliputi pengungkapan atas jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi dan tarif kapitalisasi. Berdasarkan temuan, penulis menganalisis berdasarkan hasil konfirmasi kepada narasumber sebagai berikut:

1. Filosofis Terbentuknya PSAK 26 dan Penerapan di Indonesia

Tabel 4

Konfirmasi Filosofis Terbentuknya PSAK 26 dan Penerapan di Indonesia

| | |
|--------------|---|
| Pertanyaan | Menurut pandangan Bapak bagaimanakah filosofis terbentuknya PSAK 26 dan bagaimana penerapannya pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia? |
| Narasumber 1 | PSAK 26 disusun untuk memberi panduan yang jelas kepada perusahaan agar tidak melakukan <i>judgement</i> yang berlebihan dalam mengkapitalisasi biaya pinjaman yang seharusnya diakui sebagai beban tetapi oleh perusahaan dikapitalisasi menjadi aset tetap sehingga dapat berdampak pada rekayasa laporan keuangan. Untuk penerapan di Indonesia kemungkinan masih belum sepenuhnya sesuai PSAK 26 sehingga perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut. |
| Narasumber 2 | Dengan diterapkannya standar akuntansi tentang pengakuan aset tetap dimana perolehannya termasuk semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap tersebut dan ada kemungkinan biaya yang digunakan berasal dari pinjaman umum sehingga perlu ditetapkan batasan berupa rata-rata tertimbang dalam penentuan biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi menjadi aset oleh karena itu diperlukan panduan dalam rangka penentuan jumlah biaya pinjaman yang dapat dikapitalisasi sebagaimana yang diatur dalam PSAK 26. Untuk penerapan di Indonesia sepertinya perusahaan belum terlalu berfokus pada penerapan PSAK 26 karena hal tersebut bukan merupakan isu utama perusahaan. |

Sumber: Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa filosofi terbentuknya PSAK 26 bertujuan untuk memberi panduan yang jelas terkait perlakuan biaya pinjaman atas aset tetap yang dapat dikapitalisasi atau seharusnya ditetapkan sebagai beban. Ketidaksesuaian perlakuan kapitalisasi biaya pinjaman yang seharusnya diakui sebagai beban dapat menyebabkan informasi yang diterima oleh pengguna laporan keuangan menjadi bias. Kesalahan informasi dapat mengakibatkan kesalahan analisis dalam pengambilan keputusan investasi oleh investor dan calon investor (Christanti & Mahastanti, 2011). Oleh karena itu, penerapan PSAK 26 diharapkan dapat mengurangi adanya potensi rekayasa laporan keuangan.

2. Penyebab Kebijakan Akuntansi Biaya Pinjaman Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Tidak Sesuai Ketentuan

Tabel 5

Konfirmasi Penyebab Kebijakan Akuntansi Biaya Pinjaman Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Tidak Sesuai Ketentuan

| | |
|--------------|---|
| Pertanyaan | Berdasarkan temuan saya, terdapat 15 dari 18 perusahaan sampel yang melakukan kapitalisasi biaya pinjaman atas aset tetap tidak sepenuhnya mengungkapkan informasi seperti jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi, dan tarif kapitalisasi. Selain itu ada perusahaan yang melakukan kapitalisasi biaya pinjaman tetapi tidak menyajikan kebijakan akuntansinya seperti apa. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK 26. Menurut pandangan Bapak mengapa hal tersebut bisa terjadi? |
| Narasumber 1 | Alasan perusahaan tidak melakukan pengungkapan jumlah biaya pinjaman dan tarif kapitalisasi yaitu karena menurut penilaian perusahaan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak material sehingga tidak perlu diungkapkan. Hal tersebut seharusnya sudah diatensi oleh auditor pada saat melakukan audit laporan keuangan perusahaan. |
| Narasumber 2 | Terdapat beberapa kemungkinan alasan atas hal tersebut diantaranya 1) perusahaan memang benar-benar tidak melakukan kapitalisasi walaupun tidak menyatakan secara tegas, 2) menurut perusahaan hal tersebut tidak perlu diungkapkan karena berkaitan dengan strategi bisnis, 3) Perusahaan memandang hal tersebut bukan hal yang material mengingat laporan keuangan telah diaudit oleh auditor dan tidak diberikan atensi untuk kasus tersebut sehingga perusahaan tetap tidak melakukan pengungkapan untuk tahun-tahun berikutnya, 4) Perusahaan melakukan penyesuaian terhadap peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. |

Sumber: Wawancara

Berdasarkan pembahasan diketahui bahwa 15 perusahaan belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diatur dalam PSAK 26. Beberapa kendala perusahaan yaitu kesulitan dalam menentukan jenis pinjaman yang digunakan termasuk pinjaman umum atau pinjaman khusus, kesulitan menentukan tarif kapitalisasi apabila jumlah pinjaman besar dengan frekuensi pinjaman yang banyak, dan terdapat subjektivitas perusahaan yang memandang pengungkapan biaya pinjaman atas aset tetap yang dikapitalisasi sebagai hal yang tidak material sehingga tidak perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Penyebab lainnya karena perusahaan menyesuaikan peraturan perpajakan yang berlaku dimana apabila beban yang terjadi tidak

berpengaruh signifikan terdapat aset tetap dan *net income* perusahaan maka perusahaan tidak akan mengkapitalisasinya sebagai biaya pinjaman. Namun, perlakuan tersebut dapat menurunkan kualitas laporan keuangan yang digunakan baik oleh investor maupun kreditor (Edvandini et al., 2014).

3. Penyebab Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Belum Sepenuhnya Menerapkan Ketentuan Akuntansi Biaya Pinjaman Aset Tetap

Tabel 6
Konfirmasi Penyebab Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Belum Sepenuhnya Menerapkan Ketentuan Akuntansi Biaya Pinjaman Aset Tetap

| | |
|--------------|---|
| Pertanyaan | Menurut pandangan Bapak mengapa perusahaan pada subsektor makanan dan minuman di BEI belum sepenuhnya menerapkan ketentuan PSAK 26 padahal disisi lain aset tetap perusahaan tersebut cukup besar? |
| Narasumber 1 | Ada beberapa kemungkinan yang mendasari yaitu 1) jumlah biaya pinjaman yang seharusnya dikapitalisasi dipandang tidak material oleh perusahaan. 2) Aset tetap yang dibangun tidak memenuhi kategori aset kualifikasian, 3) Perusahaan kesulitan dalam menentukan jenis pinjaman, atau 4) Perusahaan menggunakan sumber pendanaan lain dalam membangun aset tetap perusahaan misalnya dari modal pemegang saham. |
| Narasumber 2 | Kemungkinan karena perusahaan memandang penerapan PSAK 26 bukan merupakan isu utama yang wajib diterapkan. Perusahaan akan cenderung mengakui interest expense sebagai beban jika nilainya tidak terlalu berpengaruh terhadap net income perusahaan. Selain itu juga tidak dapat dipastikan berapa jumlah aset tetap perusahaan subsektor makanan dan minuman yang dibiayai dari pinjaman atau dari pembiayaan lainnya. |

Sumber: Wawancara

Perusahaan subsektor makanan dan minuman merupakan subsektor yang memiliki aset tetap yang lebih dominan dalam proporsi asetnya mengingat proses bisnisnya mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Di sisi lain aset tetap yang lebih besar tidak langsung membuat perusahaan dalam subsektor tersebut menerapkan ketentuan akuntansi biaya pinjaman secara menyeluruh sebagaimana yang diatur dalam standar akuntansi yang berlaku. Hal tersebut disebabkan kemungkinan adanya pandangan dari manajemen perusahaan yang menganggap nilai biaya pinjaman yang seharusnya dikapitalisasi tidak material dalam laporan keuangan perusahaan. Di sisi lain, aset tetap yang dibangun oleh perusahaan tidak memenuhi kategori aset kualifikasian.

Kesulitan menentukan jenis pinjaman yang digunakan juga menjadi hambatan dalam melakukan kapitalisasi biaya pinjaman mengingat apabila ada kebutuhan yang darurat, pinjaman khusus yang seharusnya digunakan untuk membangun aset tetap sementara waktu dialihfungsikan untuk keperluan lain sehingga muncul kebingungan apakah pinjaman tersebut tetap merupakan pinjaman khusus atau menjadi pinjaman umum. Penyebab lainnya dikarenakan pembangunan aset tetap menggunakan sumber pendanaan yang lain misalnya dari penerbitan saham oleh perusahaan. Padahal, perusahaan perlu memperhatikan struktur modal yang optimal untuk menjalankan kegiatan operasional dalam rangka meningkatkan laba (Rosyadah et al., 2013).

4. Dampak Tidak Terpenuhinya Ketentuan Akuntansi Biaya Pinjaman Aset Tetap

Tabel 7
Konfirmasi Dampak Tidak Dipenuhinya Ketentuan Akuntansi Biaya Pinjaman

| | |
|--------------|--|
| Pertanyaan | Menurut pandangan Bapak apa dampak apabila perusahaan tidak sepenuhnya menerapkan kewajiban dalam PSAK 26? |
| Narasumber 1 | Dampaknya ada informasi terkait komposisi nilai aset perusahaan yang diterima oleh pengguna laporan keuangan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga dapat berpengaruh ke keputusan yang diambil. Apabila informasi tersebut diungkapkan seharusnya pengguna laporan keuangan dapat mengetahui tingkat kesehatan dan produktivitas perusahaan dalam memanfaatkan pinjaman menjadi aset tetap untuk meningkatkan profit. |
| Narasumber 2 | Hal tersebut akan sedikit berdampak terhadap informasi terkait nilai aset dan net income perusahaan yang diterima oleh pengguna laporan keuangan. |

Sumber: Wawancara

Sesuai paragraf 26 PSAK 26 disebutkan bahwa perusahaan yang melakukan kapitalisasi biaya pinjaman harus melakukan pengungkapan jumlah biaya pinjaman dan tarif kapitalisasi. Apabila perusahaan yang melakukan kapitalisasi biaya pinjaman namun tidak memenuhi ketentuan tersebut akan mengakibatkan informasi atas komposisi nilai aset perusahaan yang diterima oleh pengguna laporan keuangan menjadi tidak akurat. Informasi atas komposisi nilai aset perusahaan seharusnya dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan pinjaman menjadi aset tetap dalam rangka meningkatkan laba perusahaan. Padahal, informasi laba rugi perusahaan

dapat menjadi indikator utama terkait dengan keberhasilan perusahaan dalam aktivitas operasi (Rosyadah et al., 2013).

5. Kendala Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman dalam Menerapkan PSAK 26

Tabel 8
Konfirmasi Kendala Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman dalam Menerapkan PSAK 26

| | |
|--------------|---|
| Pertanyaan | Menurut pandangan Bapak apakah kendala perusahaan subsektor makanan dan minuman dalam menerapkan PSAK 26 dan apa saja tindakan yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kendala tersebut? |
| Narasumber 1 | Kendala yang dialami perusahaan yaitu perlu adanya cost untuk menerapkan PSAK tersebut dan kesulitan yang dialami oleh perusahaan dalam menentukan pinjaman umum dan pinjaman khusus. Langkah-langkah yang dapat dilakukan diantaranya adalah perusahaan harus menetapkan kebijakan yang konsisten dalam menetapkan kriteria batasan-batasan jenis pinjaman |
| Narasumber 2 | Kendala yang dialami perusahaan yaitu perusahaan memerlukan SDM yang dapat secara terus menerus mengikuti perubahan standar akuntansi yang berlaku dan perlu biaya untuk penerapannya. Selain itu perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk mengakses standar akuntansi yang ditetapkan oleh IAI. Langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh perusahaan adalah melakukan update standar akuntansi secara terus-menerus dan meningkatkan pemahaman atas PSAK 26. |

Sumber: Wawancara

Penerapan PSAK 26 pada perusahaan subsektor makanan dan minuman di Indonesia belum diterapkan sesuai ketentuan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yang dihadapi oleh perusahaan yaitu penerapan PSAK 26 memerlukan SDM yang mampu memahami akuntansi biaya pinjaman mengingat standar akuntansi keuangan selalu mengalami pembaharuan. Kendala lainnya yaitu kesulitan dalam menentukan jenis pinjaman yang digunakan oleh perusahaan untuk membangun aset tetap. Selain itu, untuk dapat mengikuti perkembangan standar akuntansi keuangan khususnya yang berkaitan dengan biaya pinjaman mengharuskan perusahaan untuk mengeluarkan biaya tambahan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan penerapan akuntansi biaya pinjaman secara akurat yaitu dengan merekrut SDM yang kompeten dalam bidang akuntansi keuangan dan menetapkan kriteria yang jelas untuk membedakan jenis pinjaman yang digunakan.

Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa penyebab tidak terpenuhinya ketentuan akuntansi biaya pinjaman atas aset tetap dikarenakan adanya kesulitan dalam menentukan jenis pinjaman, kesulitan menentukan tarif kapitalisasi, penyesuaian dengan peraturan perpajakan dan subjektivitas perusahaan yang menganggap pengungkapan biaya pinjaman atas aset tetap yang dikapitalisasi sebagai hal yang tidak material. Penerapan PSAK 26 oleh perusahaan memiliki risiko dapat menimbulkan efek bias pada nilai aset, manajemen laba dan penyajian angka lainnya (Wirjolukito, 2004). Selain itu, dampak kapitalisasi biaya pinjaman pada perusahaan mengakibatkan pajak tangguhan yang tidak diperhitungkan dalam laporan posisi keuangan yang menyebabkan perusahaan cenderung tidak menerapkan akuntansi biaya pinjaman atas aset tetap (Yildiz & Kurtlar, 2016).

V. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Dari 18 perusahaan, terdapat 15 perusahaan tidak memenuhi ketentuan pengungkapan biaya pinjaman atas aset tetap sebagaimana yang diatur dalam PSAK 26. Temuan tersebut didasarkan dari adanya kebijakan akuntansi biaya pinjaman atas aset tetap yang ditetapkan oleh perusahaan namun tidak diimbangi dengan pengungkapan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi dan tarif kapitalisasi.

Tujuan terbentuknya PSAK 26 adalah untuk memberi panduan dalam menetapkan kebijakan akuntansi biaya pinjaman sehingga diharapkan dapat mengurangi adanya potensi rekayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Namun, pada perusahaan subsektor makanan dan minuman, penerapan PSAK 26 masih belum sesuai karena beberapa alasan yaitu kesulitan dalam menentukan jenis pinjaman yang digunakan termasuk pinjaman umum atau pinjaman khusus, kesulitan menentukan tarif kapitalisasi, subjektivitas perusahaan dalam mengungkapkan biaya pinjaman atas aset tetap yang dikapitalisasi sebagai hal yang tidak material yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan. dan karena perusahaan menyesuaikan peraturan perpajakan yang berlaku. Kendala yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan PSAK 26 adalah memerlukan SDM yang kompeten yang mampu mengikuti pembaharuan standar akuntansi keuangan sehingga menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan.

Penelitian ini hanya mengambil sampel berupa perusahaan di subsektor makanan dan minuman yang terdaftar pada BEI dengan jumlah sampel sebanyak 18 perusahaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data penelitian tidak hanya perusahaan yang terdaftar pada BEI serta menambah jumlah sampel yang digunakan.

Penelitian ini menyarankan kepada manajemen perusahaan sebaiknya selalu mengikuti perkembangan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan pengungkapan kapitalisasi biaya pinjaman atas aset tetap dalam laporan keuangan hendaknya disajikan dengan jelas agar mudah dipahami oleh pemangku kepentingan dengan demikian, keputusan ekonomis yang diambil menjadi tepat. IAI perlu berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar melakukan pembinaan kepada perusahaan dan auditor laporan keuangan sehingga informasi dalam laporan keuangan perusahaan terkait pengungkapan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi dan tarif kapitalisasi diungkapkan secara jelas sebagaimana yang diatur dalam standar akuntansi keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, & Adriani. 2020. Analisis Penerapan Akuntansi Aktiva Tetap Pada Pt Pln (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra Dan Sulbar Area Makassar Selatan. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(1), 27–32. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i1.1894>
- Baridwan, Z. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi, edisi kedua*. BPFE.
- Biswan, A. T., & Mahrus, M. L. 2020. *Praktik Akuntansi Keuangan Menengah*. PKN STAN Press.
- Bursa Efek Indonesia. 2020. *Laporan Keuangan dan Tahunan Perusahaan Tercatat*. <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/laporan-keuangan-dan-tahunan/>
- Christanti, N., & Mahastanti, L. A. 2011. Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Investor Dalam Melakukan Investasi. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan | Journal of Theory and Applied Management*, 4(3), 37–51. <https://doi.org/10.20473/jmtt.v4i3.2424>
- Daniela, M. M. 2018. Choice of Accounting Policies on Borrowing Cost in View on IAS 23. *Ovidius University Annals, Economic Sciences Series*, XVIII(2), 634–637.
- Dragu, I.-M., & Tiron Tudor, A. 2011. Developing An Econometric Model For Measuring The Evolution Of Information Disclosure - Ias 23 Borrowing Costs -. *Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica*, 2(13), 254–259. <https://doi.org/10.29302/oconomica.2011.13.2.8>

- Edvandini, L., Subroto, B., & Saraswati, E. 2014. Telaah Kualitas Informasi Laporan Keuangan dan Asimetri Informasi Sebelum dan Setelah Adopsi IFRS. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2014.04.5008>
- Fatrianisa, S. M., Tjandrakirana, R., & Saftiana, R. 2013. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Sriwijaya Eye Centre Palembang. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 7(2), 111–122.
- Firmansyah, A. 2020. *Analisis Penggunaan Metode Penyusutan Aset Tetap Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia* (Issue June).
- Rolihlahla, Ghusti Ayu Criestiant. 2012. Perlakuan Akuntansi Atas Biaya Pinjaman Pada Industri Properti Melalui Kredit Perbankan Berdasarkan PSAK 26 (revisi 2012). 26(revisi), 1–14.
- Hapsah, S. 2017. *Pengaruh Investasi Aktiva Tetap Terhadap Perolehan Laba Pada Perkebunan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Bukit Sentang Kab. Langkat*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 Tentang Aset Tetap. In *Aset Tetap* (Vol. 16, Issue 16).
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018b. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 26 Tentang Biaya Pinjaman*.
- Izzanizza. 2013. *Pengertian dan Tujuan Pembiayaan*. <https://izzanizza.wordpress.com/2013/03/28/pengertian-dan-tujuan-pembiayaan/>
- Kieso, D., Weygandt, J., & Kimmel, P. 2018. *Financial Accounting : IFRS Based* (3e ed.). Wiley. <https://drive.google.com/drive/folders/1o04S7HbLTi-NjDHXGH4ukDGZnvU5nryo>
- Margani, M., Komara, R., Firmansyah, E. A., & Layyinaturobaniyah, L. 2019. Maturity Matching Struktur Aset dan Struktur Keuangan: Studi pada Perusahaan Manufaktur, Dagang, dan Jasa di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Inspirasi Bisnis Dan Manajemen*, 3(2), 117. <https://doi.org/10.33603/jibm.v3i2.2566>
- Muthupandian, K. 2009. IAS 23 Borrowing Costs - A Closer Look. *The Management Accountant*, 44(11), 873–877.
- Nurhadi, N. 2018. Pembiayaan Dan Kredit Di Lembaga Keuangan. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(2), 14–24. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(2\).2804](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2804)
- OJK. 2020. *Statistik Lembaga Pembiayaan Periode Desember 2020*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Pages/Statistik-Lembaga-Pembiayaan-Periode-Desember-2020.aspx>
- Pahlepi, R. 2011. *Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No. 16 Pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*. 16, 1–47.

- Pratiwi, A. Z. 2013. Penerapan PSAK No. 26 Tentang Biaya Pinjaman (Studi Kasus pada PT. "X"). *Neliti.Com*, 3 (1), 1. <https://www.neliti.com/publications/246310/penerapan-psak-no26-tentang-biaya-pinjaman-studi-kasus-pada-ptx>
- Putri, I. S. 2017. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada PT. Fokusindo Mitra Teknik Berdasarkan PSAK No. 16. *E-Journal Akuntansi" EQUITY"*, 16, 290–298. <http://fe.ubhara.ac.id/ojs/index.php/equity/article/view/482>
- Rosyadah, F., Suhadak, & Darminto. 2013. Analisis Pengaruh Struktur Modal Terhadap Profitabilitas. *Accounting*, 2(3), 1–11.
- Sudiantara, G. 2019. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berwujud Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pada Hotel Sayang Maha Mertha Jalan Lebak Bene (Melasti), Legian Kelod, Kuta. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 7(1), 12. <https://doi.org/10.23887/vjra.v7i1.20740>
- Suyatno, A. 2016. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet: Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*. (n.d.).
- Wahyuni. 2019. Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 Pada PT. Asam Jawa Medan. *Rabit: Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 1(1), 2019.
- Wirjolukito, A. 2004. Evaluasi Konseptual Atas Psak No. 26 Serta Dampaknya Terhadap Sektor Properti. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 14–44. <https://doi.org/10.21002/jaki.2004.08>
- www.globenewswire.com. 2020. *Future Trends And Drivers Of The Global Lending Market 2020 - Digitalization And Blockchain Penetration Across Various Sectors As Per Lending Global Market Report 2020-30*. <https://www.globenewswire.com/news-release/2020/11/24/2133020/0/en/Future-Trends-And-Drivers-Of-The-Global-Lending-Market-2020-Digitalization-And-Blockchain-Penetration-Across-Various-Sectors-As-Per-Lending-Global-Market-Report-2020-30.html>
- www.idnfinancials.com. 2020. *A "missing" family of classical orthogonal polynomials*. <https://www.idnfinancials.com/company/industry/food-and-beverages-42>
- www.invesnesia.com. (n.d.). *Daftar Perusahaan Makanan dan Minuman di BEI terbaru*. Retrieved April 5, 2021, from <https://www.invesnesia.com/perusahaan-makanan-dan-minuman-di-bei>
- Yildiz, E., & Kurtlar, M. 2016. *Capitalisation Of IAS 23 Borrowing Cost And Effects On Financial Statements*.

Lampiran

Sampel Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman

| No | Kode | Nama Perusahaan | Tanggal Pencatatan |
|----|------|--|--------------------|
| 1 | AISA | PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk | 11 Juni 1997 |
| 2 | ALTO | PT Tri Banyan Tirta Tbk | 10 Juli 2012 |
| 3 | CEKA | PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk | 30 September 1998 |
| 4 | DLTA | PT Delta Djakarta Tbk | 27 Februari 1984 |
| 5 | ICBP | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 7 Oktober 2010 |
| 6 | INDF | PT Indofood Sukses Makmur Tbk | 17 Mei 1994 |
| 7 | MLBI | PT Multi Bintang Indonesia Tbk | 15 Desember 1981 |
| 8 | MYOR | PT Mayora Indah Tbk | 4 Juli 1990 |
| 9 | PSDN | PT Prasadha Aneka Niaga Tbk | 22 September 1994 |
| 10 | ROTI | PT Nippon Indosari Corpindo Tbk | 28 Juni 2010 |
| 11 | SKBM | PT Sekar Bumi Tbk | 5 Januari 1993 |
| 12 | SKLT | PT Sekar Laut Tbk | 8 September 1993 |
| 13 | STTP | PT Siantar Top Tbk | 16 Desember 1996 |
| 14 | ULTJ | PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk | 16 Mei 1990 |
| 15 | ADES | PT Akasha Wira International Tbk | 14 Juni 1994 |
| 16 | BUDI | PT Budi Starch & Sweetener Tbk | 8 Mei 1995 |
| 17 | BTEK | PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 13 Mei 2004 |
| 18 | IIKP | PT Inti Agri Resources Tbk | 14 Oktober 2002 |

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman